

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia belum mampu mempertanggung jawabkan keuangan dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia terutama pada sektor pemerintah daerah. Persaingan di dunia pemerintah yang dilandasi oleh unsur politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan (*fraud*). Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunkan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Terdapat opini bahwa kecurangan dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan komisi fakta kritis (Sinaga, 2022).

ACFE mengategorikan *fraud* menjadi 3 kategori utama. Pertama adalah penyelewengan aset, yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi. Kedua, korupsi yang merupakan penipuan dengan menggunakan pengaruh mereka secara salah dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, dimana hal tersebut bertentangan dengan tugas terhadap atasan mereka atau hak-hak orang lain. Dan ketiga adalah kecurangan laporan keuangan, yang umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan instansi pemerintah.

Korupsi telah lama berkembang di Indonesia hingga menjadi suatu hal sistemik. Menurut Survei *Fraud* Indonesia 2019 yang diselenggarakan oleh ACFE, korupsi merupakan jenis *fraud* terbanyak yang dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan jenis *fraud* lain, yaitu penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Kasus kecurangan yang juga banyak terjadi berawal dari kecurangan akuntansi yang lebih menengah pada tindak korupsi. Menurut skor *corruption perception index* (CPI), Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara dengan angka 34. Indonesia menempati urutan ke-4 di negara ASEAN. Pada tahun 2020 Indonesia memiliki persepsi sebesar 37. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka persepsi oleh masyarakat Indonesia terhadap upaya pemerintah dalam membrantas korupsi, tindak pidana korupsi sudah banyak dilakukan pejabat atau pegawai di pemerintah dalam beberapa tahun ini baik pelaku berasal dari kepala daerah, pejabat birokrasi, pegawai kontrak, serta pegawai negeri sipil (Mawadda, 2019).

Pada entitas pemerintah, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Mansnadifu et al., 2021).

Pernyataan palsu dalam pelaporan atau *fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat di analogika kan dengan istilah *window dressing*.

Menurut (Wahyuningsih et al., 2022) tingginya KECENDERUNGAN kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah disebabkan oleh informasi yang diterima manajemen tidak akurat sehingga menjadi penghambat bagi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan yang tepat bagi pencapaian tujuan instansi. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi, pelaporan akuntansi. Pengendalian internal ini berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan saat melindungi sumber daya instansi, baik berwujud maupun tidak. Pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi merupakan hal yang penting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi KECENDERUNGAN kecurangan akuntansi, dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor, faktor pertama keefektifan pengendalian internal, faktor kedua ketaatan aturan akuntansi dan faktor ke tiga moralitas manajemen:

Faktor pertama yaitu keefektifan pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aset, dan niat

pegawaidalam melakukan tindak kecurangan. Banyaknya kasus *fraud* disebabkan tidak adanya sistem pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian internal tersebut, sehingga pengawasan atau pengdalian yang lemah atau kurang baik, kurangnya kejujuran , regulasi danprestasi kerja yang buruk sehingga para pelaku kejahatan dapat melakukan tindakannya dengan leluasa. Selain itu *fraud* juga dapat diartikan dengan karakter manusia itu sendiri. Karakter manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan itu sangat penting serta tidak boleh di hilangkan.

Selain keefektifan pengendalian internal faktor kedua ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor yang mempengaruhi Kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman padaaturan akuntansi yang berlaku.

Tabel 1.1
Anggaran pendapatan daerah, dan belanja daerah
Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	2.327.870.000,00	2.160.380.000,00
2	2019	2.679.320.000,00	2.350.120.000,00
3	2020	2.687.210.000,00	2.167.210.000,00
4	2021	2.626.630.000,00	2,222,270.000,00
5	2022	2.642.660.000,00	2.099.720,000,00

Sumber: Portal APBD Kota Padang

Fenomena ini terlihat pada kasus yang ditemukan dari hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota padang tahun anggaran 2022 ditemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.605.138.659,00 anggaran yang seharusnya Rp

2.642.660.000,00 menjadi Rp.3.247.798.659,00 atas pembayaran belanja perjalanan dinas yang melebihi standar dan tidak sesuai pengeluaran riil. Dan terdapat juga kurangnya anggaran pembangunan gedung sebesar Rp.500.000.000,00 Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam suatu pemerintah karena apabila laporan keuangan tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menimbulkan Perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi.

Selain ketaatan aturan akuntansi faktor ke tiga moralitas manajemen juga dapat mempengaruhi Kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Salam (2002:2) moral berasal dari kata *mores* yang berasal dari kata *mos* yang berarti kesuilaaan, tabiat, atau kelakuan. Berarti moral dapat di artikan sebagai kesuilaaan. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggirendahnya moral seseorang. Teori ini berpandangan pada tingkat penalaran moral. Semakin tinggi tahapan moralitas manajemen (*postkonvesional*), semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan pribadinya. Serta moralitas merupakan pemikiran yang objektif dan rasional dan juga selain itu moralitas merupakan hukum yang universal ,Oleh karenanya semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari Kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey, kecurangan akuntansi dapat terjadi dikarenakan adanya *fraud triangle* yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan sikap/rasionalisme (Tuanajotta 2018). Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan, kesempatan berarti terdapat situasi didalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap/rasionalisasi menunjukkan dimana suatu instansi merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur atau berbuat curang.

Pengendalian internal memegang peran dalam organisasi atau instansi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menurut peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan akuntansi juga disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan tanggung jawab moral perusahaan. Faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan akuntansi adalah ketidakpuasan terhadap tingkat kompensasi (Wahyuningsih et al., 2022) Perilaku tidak etis mempengaruhi banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Perilaku tidak etis merupakan Perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut (Rahmah & Haryoso, 2018) Perilaku tidak etis dapat terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap karyawan

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga karyawan bebas melakukan kecurangan dalam sebuah perusahaan atau instansi yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (**Kurnia et al., 2021**) dengan variabel keefektifan pengendalian internal, Perilaku Tidak Etis, kesesuaian kompensasi, dan Kecenderungan kecurangan Akuntansi .

Objek yang digunakan peneliti ini yaitu di PT Sari Lembah Subur Pelalawan, pada hasil penelitian ini keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka penulis tertarik untuk menambahkan variabel moralitas manajemen dan ketaatan aturan akuntansi dan Perilaku tidak etis sebagai variabel intervening dengan objek pada instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang.

Pada penelitian (**Mawadda, 2019**) dengan variabel "Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Akuntan Pemerintah" perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel independennya yaitu kesesuaian kompensasi diganti dengan ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi diganti dengan moralitas manajemen, dan pada penelitian terdahulu memilih objek di Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pada penelitian ini memilih objek pada pemerintah daerah di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang.

Dengan adanya dua perbedaan penelitian terdahulu diatas maka peneliti menjadikan bahan perbandingan atau tolak ukur dengan penelitian-penelitianterdahulu maka penulis tertarik mengambil judul skripsi **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kasus kecurangan akuntansi tidak hanya di perusahaan swasta namun juga di instansi pemerintah, salah satunya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota padang.
2. Rendahnya keefektifan pengendalian internal membuat peluang seseorang melakukan Perilaku yang tidak etis
3. Adanya kesempatan karena lemahnya pengendalian intern yang dapat memicu pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan
4. Masih adanya pelaku yang masih kurang menaati aturan akuntansi yang menimbulkan seseorang melakukan kecurangan
5. Masih rendahnya sikap moralitas manajemen dalam menangani kecurangan akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
6. Ketaatan aturan akuntansi yaitu taat atau patuh pada aturan akuntansi yang dijadikan standar dalam pengeukuran dan penyajian laporan keuangan. Dinyatakan menaati aturan akuntansi jika organisasi telah menerapkan

persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (PSAK No. 1, IAI, 2001).

7. Perilaku tidak etis yaitu Perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam organisasi. Terdiri dari penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan sumber daya serta Perilaku tidak berbuat apa-apa.
8. Level penalaran moral yaitu moralitas yang merupakan faktor penting dalam timbulnya kecurangan. Semakin tinggi level penalaran moral maka, individu akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar sebaliknya, apabila individu memiliki level penalaran moral yang rendah akan memungkinkan untuk melakukan kecurangan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar peneliti lebih fokus dan terarah maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variable independen : keefektifan pengendalian internal (X1),ketaatanaturan akuntansi (X2),moralitas manajemen (X3), variable dependen adalah Kecenderungan kecurangan akuntansi (Y) dan variable intervening dengan Perilaku tidak etis (Z).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian ini yang telah disampaikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Pada Skpd Kota Padang ?

2. Bagaimana Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Pada SKPD Kota Padang?
3. Bagaimana Pengaruh Moralitas Manajemen Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Pada SKPD Kota Padang ?
4. Bagaimana Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Padang ?
5. Bagaimana Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Padang ?
6. Bagaimana Pengaruh Moralitas Manajemen Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Padang?
7. Bagaimana Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada SKPD Kota Padang?
8. Bagaimana Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variable Intervening Pada SKPD Kota Padang?
9. Bagaimana Pengaruh Moralitas Manajemen Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variable Intervening Pada SKPD Kota Padang?
10. Bagaimana Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Padang ?

1.5.Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap Perilaku tidak etis pada SKPD
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap Perilaku tidak etis pada SKPD
3. Untuk mengetahui Bagaimana moralitas manajemen berpengaruh terhadap Perilaku tidak etis pada SKPD
4. Untuk mengetahui Bagaimana keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD
5. Untuk mengetahui Bagaimana ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan kauntansi pada SKPD
6. Untuk mengetahui Bagaimana moralitas manajemen berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD
7. Untuk mengetahui Bagaimana ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi dengan Perilaku tidak etis sebagai variable intervening pada SKPD
8. Untuk mengetahui Bagaimana moralitas manajemen berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi dengan Perilaku tidak etis sebagai variable intervening pada SKPD

9. Untuk mengetahui bagaimana keefektifan pengendalian berpengaruh terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi dengan Perilaku Tidak etis sebagai variabel intervening pada SKPD
10. Untuk mengetahui bagaimana Perilaku tidak etis terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang akuntansi, memberikan bukti mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan Perilaku tidak etis terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi, dan menjadi perbandingan antara apa yang sudah dipelajari dengan prakteknya.
 - b. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran atau asumsi untuk masyarakat luas dan di gunakan untuk bahan referensi serta masukan kepada beberapa pihak yang akan melakukan penelitian yang sejalan dengan Kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi perusahaan dan pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi, pertimbangan, dan masukan dalam menyikapi fenomena kecurangan akuntansi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan ketaatan aturan akuntansi yang sesuai dalam suatu instansi dan memberikan dorongan untuk karyawan dalam bersikap atau berperilaku etis sebagai upaya meminimalisir sesuatu yang mengakibatkan seseorang akan cenderung berbuat curang pada perusahaan, dan pemerintah

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan baru yang berhubungan dengan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan Perilaku tidak etis, terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmu terkait dengan pengauditan yang telah didapat di bangku kuliah, serta penelitian ini juga merupakan tugas akhir yang digunakan sebagai syarat kelulusan.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan mampu menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan

akuntansi, moralitas manajemen dan Perilaku tidak etis terhadap Kecenderungan kecurangan akuntansi.